

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini masalah kemiskinan dan pengangguran bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia, terlepas apakah negara tersebut berkembang maupun sedang berkembang kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahasnya. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja.

Dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan maka permasalahan sosial lainnya sebagai dampak kemiskinan juga bertambah. Seperti, masalah lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya angka kriminalitas, berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat, dan makin rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup.¹

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standart hidup minimum, pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²

¹ Jurnal *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)* Volume 1 No.5 oleh Siaga Basu Murbeng

² Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 113.

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). Berdasarkan profil kemiskinan BPS, walaupun dari sisi jumlah kemiskinan di perdesaan menurun, namun secara persentase penduduk miskin meningkat. Pada bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 14,21 persen, lalu turun pada September 2015 menjadi 14,09 persen kemudian naik 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen.³

Pemerintah telah berupaya menyalurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia, salah satu cara dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan yang dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini merupakan pengembangan yang lebih luas (*scaling up*) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya,⁴ pilar utama PNPM Mandiri adalah PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) yang merupakan penyempurnaan dari PPK.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan

³ <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229> diakses pada tanggal 1 November 2016.

⁴ Hasil wawancara mengenai program PNPM dengan Ibu Fatima selaku anggota UPK pada tanggal 10 Desember 2016.

berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan kemudian dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan.⁵ Jenis kegiatan program PNPM ini ada 3 yaitu: (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM (2) kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan (3) kegiatan penambahan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Untuk masyarakat desa sendiri, secara umum hasil PNPM tentu sangat dirasakan manfaatnya, terkait hasil program bisa dilihat diseluruh penjuru negeri akan mudah ditemukan prasasti-prasasti di depan jalan, jembatan, bangunan sekolah, bangunan untuk layanan kesehatan, dan banyak bangunan infrastruktur lainnya bertuliskan PNPM Mandiri Perdesaan. Prasasti-prasasti itu membuktikan negara hadir memberdayakan masyarakat desa dengan pembangunan yang mereka rencanakan dan laksanakan sendiri.

Pada saat ini masyarakat tengah gencar membicarakan mengenai salah satu program dari PNPM, yang kegiatannya memberikan pinjaman untuk perempuan yang ingin memulai sebuah usaha maupun pengembangan usaha yang sudah dimiliki, program ini adalah SPP. Aset SPP di kecamatan Labang sendiri cukup berkembang, pada tahun 2009 asetnya sebesar 560 Juta dan pada tahun 2016 sudah hampir mencapai 2 M.⁶

⁵ Jurnal *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Desa Sonowangi Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang* oleh Iin Nimang Pangesti

⁶ Lihat Lampiran 1

Pilihan hanya kepada kelompok perempuan didasarkan pada penilaian bahwa perempuan dianggap paling miskin di antara yang miskin karena peran gandanya dalam rumah tangga. Sebagai pengatur pengeluaran rumah tangga, perempuan sering dihadapkan pada kenyataan bahwa dia tidak mempunyai uang untuk membayar anak sekolah, biaya berobat, atau bahkan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Karena itulah SPP dihadirkan dengan memberdayakan kelompok-kelompok perempuan yang ada di desa.

Cikal bakal kelompok-kelompok itu bisa dari kelompok pengajian, arisan, dan lain-lain, yang memiliki kegiatan simpan pinjam. Kelompok-kelompok ini diberdayakan dan diberikan pinjaman modal agar menjadi berkembang. Kegiatan simpan pinjam dalam kelompok SPP ini yang kemudian menjadi tumpuan anggota ketika secara mendadak membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangganya.⁷

Sasaran SPP adalah desa-desa yang dinilai berkembang maupun kurang berkembang, Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan termasuk salah satu desa yang masuk dalam program PNPM-MPd, karena lapisan masyarakatnya homogen yaitu petani, akan tetapi lahan pertanian dalam desa tersebut kurang memberikan hasil signifikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin berat dan mendesak, sehingga makin meningkatkan angka kemiskinan.

Dari masalah tersebut, kemudian timbul pemikiran untuk memperluas ruang lingkup pengintegrasian dengan berbagai program pengembangan kesempatan

⁷ Hasil wawancara mengenai program PNPM dengan Ibu Fatima selaku anggota UPK pada tanggal 10 Desember 2016.

kerja nonpertanian di daerah perdesaan seperti usaha kecil serta perdagangan. Program yang semakin banyak serta pengembangan kesempatan kerja pada sektor nonpertanian mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat desa ini kemudian lebih populer disebut sebagai pembangunan desa (*Rural Development*).⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, industri kecil dan perdagangan perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja, sudah cukup banyak masyarakat Ds. Jukong yang berdagang dan memiliki usaha kecil-kecilan terlebih lagi kaum perempuan atau ibu-ibu. Berdagang dilakukan guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf perekonomian, namun permodalan menjadi salah satu masalah mengapa usaha yang ada tersebut kurang berkembang.

Adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena SPP dirancang agar para perempuan di desa mempunyai solusi cepat atas masalah keuangan dalam rumah tangganya dan terhindar dari jerat rentenir. Dana atau permodalan yang diperoleh tersebut dapat digunakan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan karena dalam Islam mengajarkan pola konsumsi yang wajar dan tidak berlebih-lebihan, sehingga masyarakat dapat memperoleh dampak yang positif dengan adanya program ini. Apalagi dalam *al-Qur'an* juga melarang terjadinya perbuatan *mubadzir* (menghamburkan harta tanpa guna).

Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu *Pertama*, menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, *Kedua*, memberantas kemiskinan absolut

⁸ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 172.

dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat, *Ketiga*, mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.⁹ Berangkat dari fenomena ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana implementasi program SPP PNPM-MPd ini dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim yang ada di Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti tentang **“IMPLEMENTASI PROGRAM SPP PNPM-MPd DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUSLIM (Studi Kasus pada SPP PNPM-MPd Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar-dasar pengelolaan kegiatan SPP PNPM-MPd yang ada di Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan?
2. Bagaimana implementasi program SPP PNPM-MPd dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim di Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar-dasar pengelolaan kegiatan pada program SPP PNPM-MPd yang ada di Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan

⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 19.

2. Untuk mengetahui implementasi program SPP PNPM-MPd dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok program SPP PNPM-MPd di Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis sendiri sebagai wadah pengembangan diri dan penerapan teori-teori yang akan dijadikan sebagai tugas akhir perkuliahan.
2. Untuk penulis lain diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lanjutan khususnya dalam pelaksanaan SPP PNPM-MPd.
3. Bagi penyelenggara UPK diharapkan sebagai referensi tambahan dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat muslim khususnya dalam pelaksanaan SPP PNPM-MPd.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang implementasi program SPP PNPM-MPd dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim.

Mita Eriasti (2010) dalam skripsinya yang berjudul *“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) di Desa Batu Gajah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangatlah baik,

di mana antusias masyarakat sangat besar dengan adanya program ini, karena mereka merasa program ini sangat membantu mereka, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini adalah baik, karena di dalam pemberian pinjaman terdapat unsur tolong menolong antara pihak pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam dana, dan masyarakat yang meminjam tidak merasa diberatkan dengan balas jasa yang diberikan.¹⁰

Ratih Kumalasari (2015) dalam skripsinya yang berjudul *“Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses menunjukkan pelaksanaan yang kurang baik. Produk/hasil dari pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP sudah bisa dikatakan baik. Berdasarkan evaluasi hasil juga dapat diketahui ketercapaian implementasi program ini yaitu pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan yang sudah mampu dicapai oleh penerima manfaat yang menggunakan dana bantuan SPP untuk usaha. PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP layak untuk tetap dilaksanakan namun dalam pelaksanaan kegiatan SPP perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan masyarakat penerima manfaat kegiatan SPP.¹¹

¹⁰ Mita Eriasti, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) di Desa Batu Gajah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, dalam skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2010

¹¹ Ratih Kumalasari, *Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)*, dalam skripsi Universitas Jember 2015

Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis kaji. Belum ada yang membahas tentang implementasi program SPP PNPM-MPd dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim di Desa Jukong, Kec. Labang, Kab. Bangkalan. Disini penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada bagaimana implementasi dari program SPP ini dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim dilihat dari sisi penerima manfaat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan memberikan gambaran umum pada sistematika pembahasan, dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan: Pada bab pendahuluan berisi kerangka berfikir dari penulisan penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori: Kerangka teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan di gunakan dalam penelitian yakni PNPM, SPP dan Kesejahteraan.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian seperti lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta uji keabsahan data yang digunakan.

Bab IV Pembahasan: Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi (paparan data yang memuat informasi tentang lokasi atau institusi yang menjadi objek penelitian dan analisis data memuat

data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada pembahasan berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V Penutup: Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai saran dan kesimpulan dari semua penelitian yang telah dilaksanakan.